



# P-RENJA



20  
25



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JOMBANG



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Bupati R Soedirman 92 Jombang 61419 Telp.  
0321879913 fax. 0321 879913  
Email: [diskominfo@jombangkab.go.id](mailto:diskominfo@jombangkab.go.id)  
Website: [kominfo.jombangkab.go.id](http://kominfo.jombangkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Nomor : 188/ 89 /415.23/2025

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG  
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi OPD serta untuk memberikan arah kebijakan, prioritas program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dan menetapkannya dalam Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025.

**Pasal 9, ayat (2):** Perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 **perlu memperhatikan** visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD

tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

**Point 2:** Pemerintah Daerah **segera menyesuaikan** arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025.

**Point 4:** Pemerintah Daerah **segera** melakukan langkah-langkah, meliputi:

- a. Gubernur/Bupati/Walikota terpilih agar terlebih dahulu Menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan.
  - b. Menyusun rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 yang didalamnya telah **mengakomodir kebijakan Asta Cita** serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur/Bupati/Walikota terpilih.
  - c. Bupati/walikota terpilih menyampaikan rancangan peraturan kepala daerah **(Ranperkada)** tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada **minggu kedua bulan Mei** Tahun 2025.
  - d. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Mei Tahun 2025 untuk provinsi dan **minggu keempat bulan Mei Tahun 2025** untuk Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025.

4. Surat Bupati Jombang Nomor: 000.7.2/214/415.01/2025 tanggal 23 April 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan Renja PD Tahun 2025.
5. Pemenuhan penilaian MCP KPK Tahun 2025 dengan kelengkapan: Daftar dan dokumen Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk APBD Perubahan Tahun 2025.
6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang;
7. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor : 000.7.2/214/415.01/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan Renja PD Tahun 2025.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:
1. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;
  2. Mengadakan koreksi dan perbaikan atas hasil pekerjaan tim baik pada sistematika dokumen, tahapan penyusunan maupun pelaporan penulisan;
  3. Memberikan kontribusi pemikiran secara aktif terhadap penyempurnaan pekerjaan penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;

4. Memastikan konsistensi dan arah pekerjaan berdasarkan kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dimaksud Diktum PERTAMA berpedoman pada ketentuan Peraturan PerUndang- Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Membebankan segala pembiayaan pelaksanaan kegiatan Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang  
Pada tanggal : 05 Mei 2025

---

**KEPALA DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JOMBANG**



**ENDRO WAHYUDI, S.STP**

Pembina Tk. I

NIP. 19800528 199912 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR : 188/89/415.23/2025  
TANGGAL : 05 Mei 2025

---

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Anggota	Kabid Persandian dan Statistik Kabid Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Kabid Aplikasi Teknologi Informasi Perencana Ahli Muda

Ditetapkan di : Jombang  
Pada tanggal : 05 Mei 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JOMBANG**



**ENDRO WAHYUDI S.STP**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19800528 199912 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Bupati R Soedirman 92 Jombang 61419

Telp. 0321879913 fax. 0321 879913

Email: [diskominfo@jombangkab.go.id](mailto:diskominfo@jombangkab.go.id)

Website: [kominfo.jombangkab.go.id](http://kominfo.jombangkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN JOMBANG**  
**NOMOR : 188/ 96/415.23/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN**  
**INFORMATIKAKABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025, diperlukan perencanaan kerja sebagai arah dan indikator kinerja SKPD sesuai tugas dan fungsi dalam jangka waktu tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025.

**Pasal 9, ayat (2):** Perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 **perlu memperhatikan** visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

**Point 2:** Pemerintah Daerah **segera menyesuaikan** arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025.

**Point 4:** Pemerintah Daerah **segera** melakukan langkah-langkah, meliputi:

- a. Gubernur/Bupati/Walikota terpilih agar terlebih dahulu Menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan.
- b. Menyusun rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 yang didalamnya telah **mengakomodir kebijakan Asta Cita** serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur/Bupati/Walikota terpilih.
- c. Bupati/walikota terpilih menyampaikan rancangan peraturan kepala daerah **(Ranperkada)** tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada **minggu kedua bulan Mei** Tahun 2025.
- d. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Mei Tahun 2025 untuk provinsi dan **minggu keempat bulan Mei Tahun 2025** untuk Kabupaten/Kota.

3. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025.

4. Surat Bupati Jombang Nomor: 000.7.2/214/415.01/2025 tanggal 23 April 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan Renja PD Tahun 2025.

5. Pemenuhan penilaian MCP KPK Tahun 2025 dengan kelengkapan: Daftar dan dokumen Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk APBD Perubahan Tahun 2025.
6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang;
7. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor : 000.7.2/214/415.01/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan Renja PD Tahun 2025.

### **MEMUTUSKAN:**

#### **Menetapkan :**

- KESATU** : Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2025.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Belanja yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025 merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan.
- KEEMPAT** : Target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025 dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran.
- KELIMA** : Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Jombang Tahun 2025 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang  
Pada tanggal : 30 Juni 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG**



**ENDRO WAHYUDI, S.STP**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19800528 199912 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025 telah selesai disusun sebagaimana mendasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025, Pasal 9, ayat (2): Perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS..

Dengan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029, maka disusunlah Perubahan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang yang berisikan program dan kegiatan dalam rangka menunjang tujuan Renstra 2025-2029.

Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Perubahan Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025.

Jombang, 30 Juni 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JOMBANG**



**ENDRO WAHYUDI, S.STP**  
Pembina Tk. I  
NIP. 198005281999121001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD .....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	44
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	80
2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	83
<b>BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1. Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	92
3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	95
3.3. Perubahan Program dan Kegiatan.....	97
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	114

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dan setiap tahunnya berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jombang. Perubahan Renja Tahun 2025 adalah sebuah dokumen perencanaan sampai periode satu tahun 2025 dengan penjabaran dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD pada P-APBD Tahun 2025.

Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Tahapan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;
2. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;
3. Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025 dalam Peraturan Bupati dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dalam Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah setelah mendapatkan pengesahan Bupati.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika ini merupakan pelaksanaan dari Permendagri No. 12 Tahun 2024 yang merupakan pedoman resmi penyusunan RKPD Tahun 2025, yang menjadi acuan langsung bagi penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah dan Inmendagri No. 2 Tahun 2025 yang mengatur pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah periode 2025–2029.

Penyusunan dokumen Perubahan Renja PD mengacu pada rancangan akhir RPJMD Tahun 2025-2029 dan rancangan renstra PD Tahun 2025-2029. Mengakomodir kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan diformulasikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2025

Dokumen perencanaan Perubahan Renja Tahun 2025 dilakukan dalam rangka :

- a. Mengakomodir visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Jombang.
- b. Penanganan Isu Strategis Nasional dan Daerah yang harus segera di tindaklanjuti dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan yaitu:
  1. Penguatan Sumber Daya Manusia, pendidikan, dan kesehatan;
  2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
  3. Pencegahan stunting dan kemiskinan;
  4. Pengendalian Inflasi;
  5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi;
  6. Dukungan swasembada pangan;
  7. Koperasi Merah Putih;
  8. Sekolah Rakyat.
- c. Pencapaian target Sustainable Development Goals (SDG's) sebagaimana diamanatkan ketentuan perundang-undangan;
- d. Akselerasi dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Kementerian; e. Menindaklanjuti kebijakan Nasional dan Provinsi yang harus dialokasikan di daerah.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Renstra 2025-2029. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal OPD sebagai instansi yang baru. Selanjutnya Kepala OPD menetapkan Perubahan Renja OPD untuk menjadi pedoman di

lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan yang pada akhirnya akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika dengan urusan dan tupoksi sebagai berikut :

**a. Urusan**

1. Perumusan kebijakan dan program bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan dan program bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas.

**b. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian serta menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
7. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan

daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan

8. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan riil penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan beberapa landasan, yaitu mengacu antara lain pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025. Pasal 9, ayat (2): Perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

**Point 2** : Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025.

**Point 4** : Pemerintah Daerah segera melakukan langkah-langkah, meliputi:

- a. Gubernur/Bupati/Walikota terpilih agar terlebih dahulu Menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan.
- b. Menyusun rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 yang didalamnya telah mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur/Bupati/Walikota terpilih.
- c. Bupati/walikota terpilih menyampaikan rancangan peraturan kepala daerah (Ranperkada) tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada minggu

kedua bulan Mei Tahun 2025.

d. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Mei Tahun 2025 untuk provinsi dan minggu keempat bulan Mei Tahun 2025 untuk Kabupaten/Kota.

3. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025.

4. Surat Bupati Jombang Nomor: 000.7.2/214/415.01/2025 tanggal 23 April 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan Renja PD Tahun 2025.

5. Pemenuhan penilaian MCP KPK Tahun 2025 dengan kelengkapan: Daftar dan dokumen Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk APBD Perubahan Tahun 2025.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program / kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan. Perubahan Renja Tahun 2025 dipergunakan sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas dan pokok fungsinya sampai dengan periode tahun 2025.

#### **1.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah :

1. Sebagai dokumen perubahan perencanaan yang akan dilaksanakan tahun 2025 sesuai tugas pokok dan fungsinya;
2. Sebagai acuan menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

- penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RANCANGAN AWAL RENJA PD**

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

- **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- **BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Perubahan Program dan Kegiatan

- **BAB IV PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN**  
**I TAHUN 2025**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD**

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I (tahun 2025) dan perkiraan capaian sampai akhir tahun 2025 dengan mengacu pada APBD tahun 2025 yang disahkan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang melaksanakan 5 Program, 11 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 20,966,314,681 (Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dan realisasi anggaran mencapai Rp. 4.809.345.327 (Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 22,93 %.

Dari Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun capaian pada tahun 2025 triwulan I adalah sebagai berikut :

**TABEL 2.1**  
**Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dngan Triwulan I Tahun 2025**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika**

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2025				Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra S.d 2025 ((5)	
			Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I		K	Rp
			K	Rp	K	Rp		
2 16 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>9.487.819.793</b>	<b>25%</b>	<b>2.576.476.060</b>	100%	100%
2 16 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan</b>	<b>100%</b>	<b>27.603.000</b>	<b>25%</b>	<b>14.961.000</b>	100%	100%
2 16 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	12.623.000	1 Dokumen	10.021.000	100%	100%
2 16 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	14.980.000	1 Laporan	4.940.000	100%	100%
2 16 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu</b>	<b>32 Orang/Bulan</b>	<b>5.777.455.201</b>	<b>32 Orang/bulan</b>	<b>1.406.972.669</b>	100%	100%
2 16 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bulan	5.575.119.201	32 Orang/Bulan	1.400.126.669	100%	100%
2 16 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	199.976.000	1 Dokumen	4.764.000	100%	100%
2 16 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.360.000	1 Laporan	2.082.000	100%	100%
2 16 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	0 %	0	0	0	0%	0%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2025				Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra S.d 2025 ((5)	
			Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I		K	Rp
			K	Rp	K	Rp		
2 16 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	0	0	0%	0%
<b>2 16 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>333.985.340</b>	<b>25%</b>	<b>278.225.358</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2 16 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	13.819.800	3 Paket	12.819.800	100%	100%
2 16 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	62.088.100	3 Paket	18.210.000	100%	100%
2 16 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	132.778.400	1 Paket	6.681.150	100%	100%
2 16 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Dokumen	46.080.440	3 Dokumen	1.910.000	100%	100%
2 16 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	12.612.000	3 Dokumen	60.245.743	100%	100%
2 16 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	66.606.600	1 Laporan	178.358.665	100%	100%
<b>2 16 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>770.906.900</b>	<b>25%</b>	<b>177.858.665</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2 16 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	393.000.000	3 Laporan	83.667.458	100%	100%
2 16 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	377.906.900	3 Laporan	94.191.207	100%	100%
<b>2 16 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>2.577.869.352</b>	<b>25%</b>	<b>866.629.533</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2 16 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	47.540.000	1 Unit	3.845.000	100%	100%
2 16 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	17 Unit	196.075.110	17 Unit	35.485.000	100%	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2025				Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra S.d 2025 ((5)	
			Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I		K	Rp
			K	Rp	K	Rp		
	Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
2 16 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	106.338.000	2 Unit	69.320.533	100%	100%
2 16 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	63 Unit	2.227.916.242	63 Unit	757.979.000	100%	100%
2 16 01	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki layanan informasi</b>	<b>10 %</b>	<b>2.272.108.850</b>	<b>10%</b>	<b>755.198.164</b>	100%	100%
2 16 01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase masyarakat dan PD yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik</b>	<b>3.4%</b>	<b>2.272.108.850</b>	<b>2%</b>	<b>755.198.164</b>	100%	100%
2 16 01 2.01 0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	3 Laporan	1.614.060.880	3 Laporan	581.080.864	100%	100%
2 16 01 2.01 0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100%	125.174.190	25%	40.468.600	100%	100%
2 16 01 2.01 0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100%	532.873.780	25%	133.648.700	100%	100%
2 16 01 2.01	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik</b>	<b>100%</b>	<b>7.165.346.065</b>	<b>25%</b>	<b>317.543.756</b>	100%	100%
2 16 01 2.01	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah PD yang terkoneksi jaringan intra</b>	<b>53 Perangkat</b>	<b>55.771.920</b>	<b>53 Perangkat</b>	<b>14.795.202</b>	100%	100%
2 16 01 2.01 0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain	1 Dokumen	55.771.920	1 Dokumen	14.795.202	100%	100%

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2025				Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra S.d 2025 ((5)		
						Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I		K	Rp	
						K	Rp	K	Rp			
				Pemerintah Daerah dan Pengelolaan nama Domain Pemerintah Desa	Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa							
2	16	01	2.02	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi	2 Aplikasi	7.109.574.145	0 aplikasi	302.748.554	100%	100%	
2	16	01	2.02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	10 Aplikasi	350.000.000	0 Aplikasi	0	100%	100%
2	16	01	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	253.479.145	0 Aplikasi	52.300.000	100%	100%
2	16	01	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	10 Aplikasi	747.717.500	0 Laporan	101.650.000	100%	100%
2	16	01	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Aplikasi	84.650.000	0 Aplikasi	0	100%	100%
2	16	01	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	53 Perangkat	803.270.000	53 Perangkat	66.854.000	100%	100%
2	16	01	2.02	0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Program	2.500.670.000	1 Program	47.375.000	100%	100%
2	16	01	2.02	0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	4 Aplikasi	69.787.500	1 Aplikasi	34.569.554	100%	100%
2	16	01	2.02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	53 Perangkat	2.300.000.000	53 Perangkat	0	100%	100%
2	16	01			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase data Sektoral yang dipublikasikan</b>	<b>100%</b>	<b>1.318.374.148</b>	<b>25%</b>	<b>957.497.347</b>	100%	100%
2	16	01	2.01		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah data statistik sektoral yang</b>	<b>28 Data</b>	<b>1.318.374.148</b>	<b>28 Data</b>	<b>957.497.347</b>	100%	100%

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2025				Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra S.d 2025 ((5))		
						Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I		K	Rp	
						K	Rp	K	Rp			
					digunakan dalam portal satu data							
2	16	01	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	70 %	141.350.500	70 %	4.885.000	100%	100%
2	16	01	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persentase	1.096.473.748	100 Persentase	938.359.997	100%	100%
2	16	01	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	55.108.300	1 Dokumen	820.000	100%	100%
2	16	01	2.01	0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	25.441.600	1 Dokumen	13.432.350	100%	100%
2	16	01			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase Sistem aplikasi strategis yang berfungsi dengan baik</b>	<b>55%</b>	<b>722.665.825</b>	<b>55%</b>	<b>202.630.000</b>	100%	100%
2	16	01	2.01		<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan keamanan kominfo</b>	<b>53 PD</b>	<b>722.665.825</b>	<b>53 PD</b>	<b>202.630.000</b>	100%	100%
2	16	01	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	16.339.975	0 Dokumen	0	100%	100%
2	16	01	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	84.896.150	0 Laporan	8.880.000	100%	100%
2	16	01	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	53 Perangkat	621.429.700	53 Perangkat	193.750.000	100%	100%
<b>TOTAL</b>								<b>20.966.314.681</b>		<b>4.809.345.327</b>	100%	100%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan laporan capaian indikator kinerja sampai dengan tribulan I tahun 2025 (mengacu pada RPD 2024-2026) menunjukkan realisasi masih 0% dikarenakan penyusunan dokumen dilaksanakan pada Tribulan III dan IV:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2025	
		Target	Realisasi
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi melalui Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IK-TIK)	3	0
	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	67	0
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.88	0
	Indeks Pembangunan Statistik	2.5	0
	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	620	0
	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80.01	0

## 2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

### 1. Tingkat Kinerja Pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD

Berdasarkan hasil reviu pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang telah berlangsung cukup baik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai mediator masyarakat dengan aparatur

dalam penyampaian informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Namun sebagaimana umumnya yang terjadi dalam penyelenggara penyampaian informasi di pemerintah daerah di berbagai wilayah dituntut untuk lebih produktif, rasional dan mengikuti perkembangan yang ada serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada, maka masih terdapat beberapa permasalahan yang krusial dalam rangka pengembangan penyampaian informasi

## 2. Permasalahan dan Hambatan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah merupakan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi pelayanan yang diharapkan/direncanakan. Permasalahan harus ditangani dalam dokumen Rentra yang menggambarkan prioritas perangkat daerah. Secara detail berikut uraian mengenai permasalahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Berita Media masih ada yang tendensius	Keberadaan media di daerah yang berafiliasi dengan kepentingan politik tertentu masih menyajikan berita-berita yang tidak berimbang dan memihak	(1) Minimnya Komunikasi Dua Arah antara Pemerintah dan Media; (2) Tidak Adanya Pedoman atau Kode Etik Bersama Pemerintah dan Media Lokal
1	Belum semua OPD memanfaatkan media sosial dalam mempublikasikan kegiatan	Adanya kesenjangan digital antar generasi di OPD yang menyebabkan kurang optimalnya penggunaan media sosial dalam penyebarluasan informasi.	(1) Kurangnya Pemahaman tentang Pentingnya Media Sosial sebagai Sarana Komunikasi Publik; (2) Keterbatasan SDM yang Kompeten dalam Pengelolaan Media Sosial; (3) Tidak Tersedianya Pedoman dan SOP Pengelolaan Media Sosial OPD; (4) Kurangnya Pelatihan atau Kapasitas Digital di Kalangan ASN
1	Perkembangan Teknologi Informasi yang tidak bisa dikendalikan	Kesenjangan Akses dan Infrastruktur TIK	(1) Belum Tersusunnya Regulasi dan Kebijakan Pengendalian TI di Daerah; (2) Rendahnya Literasi Digital Masyarakat dan ASN; (3) Kurangnya Infrastruktur dan Sistem Pengawasan Teknologi di Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum berfungsinya PPID Pembantu di masing-masing OPD secara optimal	Tersedianya akses informasi yang mudah, adil serta keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah	(1) Kurangnya Pemahaman dan Komitmen Pimpinan OPD terhadap Keterbukaan Informasi Publik; (2) Belum Tersedianya SDM Khusus PPID Pembantu di Perangkat Daerah; (3) Minimnya Pelatihan dan Pembinaan Teknis oleh PPID Utama dan PPID Pembantu
	belum siapnya OPD dalam menampung dan menindaklanjuti pengaduan pelayanan publik	Kurangnya Pemerintah Daerah dan penyelenggara pelayanan publik lainnya untuk dapat segera terhubung dengan LAPOR agar penanganan pengaduan dapat terintegrasi secara optimal.	(1) Rendahnya Komitmen Pimpinan OPD terhadap Responsifitas Layanan Publik; (2) Kurangnya Sosialisasi Kanal Pengaduan kepada Masyarakat
	Konektivitas jaringan intra belum menjangkau seluruh perangkat daerah dan seluruh wilayah desa/kelurahan	Infrastruktur yang Tidak Memadai (Beberapa organisasi mungkin menghadapi kendala dalam meng-upgrade atau mengganti infrastruktur mereka untuk mendukung transformasi digital. Ini dapat mencakup masalah terkait dengan biaya, kompleksitas, atau kesulitan teknis)	(1) Terbatasnya Infrastruktur TIK di Daerah; (2) Kurangnya Koordinasi Antara OPD dan Penyedia Infrastruktur TIK; (2) Topografi dan Letak Geografis Wilayah yang Menjadi Tantangan Teknis khususnya pada desa
	Data center (pusat data) sebagai penempatan data dan aplikasi pemerintah daerah belum memiliki standar (SNI) sebagaimana diamanatkan Pemerintah	Integrasi data yang memerlukan komitmen bersama (Ekosistem transformasi digital salah satunya merujuk pada penggunaan data bersama sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan)	(1) Kurangnya SDM TIK yang Paham Standar Teknis dan Sertifikasi Data Center; (2) Masih Lemahnya Regulasi Teknis di Daerah Terkait Pengelolaan Data Pemerintah
	Pengembangan aplikasi SPBE di perangkat daerah yang belum sesuai peta rencana	Integrasi Sistem yang Rumit (Organisasi yang telah menggunakan sistem legacy yang sudah ada mungkin menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan solusi digital baru dengan sistem yang sudah ada. Keterbatasan interoperabilitas dapat menjadi hambatan)	(1) Tidak Ada Koordinasi Terpusat atas Pengembangan Aplikasi Antar-OPD; (2) Belum Semua OPD Memahami dan Mengacu pada Arsitektur SPBE Daerah; (3) Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi terhadap Kesesuaian Aplikasi dengan Peta SPBE

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Layanan kedaruratan 112 belum terintegrasi dan terpadu dengan layanan di perangkat daerah dan belum menjangkau seluruh wilayah kabupaten	Banyak warga belum mengetahui fungsi 112 atau menganggap itu hanya untuk kebakaran	(1) Belum Terbangunnya Sistem Integrasi Antar-Instansi Terkait; (2) Kurangnya SDM dan Tim Tanggap Darurat Khusus untuk Menangani Layanan 112; (3) Minimnya Sosialisasi dan Kesadaran Masyarakat terhadap Layanan 112
	belum adanya kebijakan, proses dan teknologi dalam pengamanan informasi	Ancaman keamanan informasi (Ancaman keamanan informasi di era digital merujuk pada potensi risiko dan bahaya yang dapat mempengaruhi keamanan data dan sistem komputer dalam lingkungan digital)	(1) Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Tentang Pentingnya Keamanan Informasi; (2) Minimnya SDM dan Kapasitas Keamanan Siber di OPD; (3) Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur Keamanan Informasi
	Minimnya Pemanfaatan Data dalam Perumusan Kebijakan	Tantangan Pengelolaan Data (Volume besar data yang dihasilkan dalam lingkungan digital dapat menjadi tantangan dalam pengelolaan, analisis, dan pemanfaatan data secara efektif.)	(1) Kualitas dan Ketersediaan Data yang Kurang Memadai; (2) Kurangnya Kapasitas SDM dalam Analisis dan Interpretasi Data
	belum adanya integrasi sistem aplikasi yang menghasilkan data	Data yang dikumpulkan oleh berbagai instansi daerah sering kali tidak terintegrasi, menyebabkan inkonsistensi dan redundansi dalam pengelolaan informasi.	(1) Pengembangan Aplikasi Dilakukan Secara Parsial dan Terpisah; (2) Tidak Tersedianya Standar Teknis dan Protokol Integrasi; (3) Minimnya SDM dengan Kompetensi Integrasi Sistem dan Manajemen Data

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang meliputi :

1. Perkembangan teknologi informasi yang pesat sehingga dibutuhkan penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM dan infrastruktur;
2. Tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang belum memadai;

3. Data statistik sektoral yang belum optimal;
4. Keamanan informasi dalam pertukaran data elektronik pemerintahan yang belum optimal;
5. Pelayanan dan pengelolaan informasi publik yang belum optimal;
6. Tantangan Keamanan Siber: keamanan siber yang semakin kompleks dapat menjadi risiko serius terutama dengan adopsi teknologi yang lebih tinggi.

### 3. Dampak terhadap Pencapaian SDGs Nasional

SDGs	Peran & Dampak Dinas Kominfo
<b>SDG 4: Pendidikan Berkualitas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kominfo mendukung <b>akses pendidikan digital</b></li> <li>• Perubahan Renja bisa memperluas cakupan TIK ke desa salah satunya program wifi gratis ke pusat publik di 302 desa dan 4 kelurahan</li> </ul>
<b>SDG 8: Pekerjaan Layak &amp; Pertumbuhan Ekonomi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan infrastruktur digital (internet desa), Kominfo mempercepat <b>ekonomi digital</b> dan kerja layak.</li> <li>• Renja yang memuat pelatihan TIK bagi perangkat daerah punya dampak jangka Panjang dan Kominfo Goes To School Bagi pelajar</li> </ul>
<b>SDG 9: Industri, Inovasi &amp; Infrastruktur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kominfo menyumbang langsung ke <b>infrastruktur informasi</b> (pusat data, fiber optic, aplikasi e-government).</li> <li>• Perubahan Renja bisa mengakselerasi inovasi berbasis data terbuka.</li> </ul>
<b>SDG 16: Perdamaian, Keadilan &amp; Kelembagaan yang Tangguh</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbukaan informasi publik layanan aduan digital, literasi anti-hoaks → mendorong <b>tata kelola pemerintahan bersih &amp; partisipatif</b>.</li> <li>• Arah kebijakan ini tercermin dalam program prioritas di Renja.</li> </ul>
<b>SDG 17: Kemitraan untuk Tujuan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kominfo sering menjembatani kemitraan lintas sektor (swasta, media, akademisi) untuk <b>inovasi layanan digital</b>. - Dukungan ini memperkuat sinergi pencapaian SDGs secara menyeluruh.</li> </ul>

### 4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan PD

#### 1. Transformasi Digital Nasional

Pemerintah pusat sedang mendorong transformasi digital di semua sektor (melalui SPBE, Satu Data Indonesia, Smart City, dll);

#### 2. Perkembangan Teknologi TIK

Adanya inovasi seperti cloud computing, AI, big data dapat diadopsi untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, dengan Teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk sistem informasi, keamanan siber, dan integrasi data antar perangkat daerah;

### 3. Kebutuhan Masyarakat Akan Layanan Digital

Masyarakat semakin terbiasa dan membutuhkan layanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis digital sehingga peluang bagi Diskominfo untuk mengembangkan aplikasi pelayanan, portal informasi, dan kanal komunikasi publik;

### 4. Kebijakan Satu Data Indonesia

Kebijakan Satu Data Indonesia sebagai pendorong dalam mengelola integrasi data antar OPD dan dapat memperkuat peran Diskominfo sebagai pengelola data;

### 5. Peningkatan Literasi Digital

Peningkatan Literasi Digital untuk meningkatkan literasi digital dikalangan masyarakat melalui program-program edukasi dan pelatihan;

### 6. Tuntutan Keterbukaan Informasi Publik

## 5. Formulasi Isu-Isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun 2025

Isu-isu strategis dalam **Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi** yang akan dihadapi pada tahun 2025 antara lain :

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Transformasi Digital	Berita Media masih ada yang tendensius	<b>Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.</b> Isu ini dirumuskan dari masukan stakeholders serta kebijakan bahwa terjadi kecepatan pergeseran perubahan budaya masyarakat pertanian	Peran media sosial yang menciptakan terjadinya tsunami informasi sehingga masyarakat cukup kesulitan untuk memilah mana informasi yang tepat dan benar	Masih adanya media yang memberitakan informasi yang kurang tepat sehingga beresiko menimbulkan hoax, misinformasi, dan disinformasi	Keberadaan media di daerah yang berafiliasi dengan kepentingan politik tertentu masih menyajikan berita-berita yang tidak berimbang dan memihak	Sosialisasi kepada media tentang pemberitaan yang berimbang

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
		menjadi masyarakat perkotaan. Isu lain yang diintegrasikan ke isu strategis ini adalah isu dari capaian TPB Kabupaten Jombang, yaitu: peningkatan tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Pedesaan				
	Belum semua OPD memanfaatkan media sosial dalam mempublikasikan kegiatan		Keselarasn Budaya Organisasi (Transformasi digital tidak hanya melibatkan aspek teknologi, tetapi juga perubahan budaya. Keselarasan budaya organisasi yang tidak memadai dapat menjadi hambatan karena resistensi terhadap perubahan)	Transformasi digital yang cukup massif ini masih belum direpson secara optimal oleh OPD di daerah	Adanya kesenjangan digital antar generasi di OPD yang menyebabkan kurang optimalnya penggunaan media sosial dalam penyebarluasan informasi.	Peningkatan kapasitas SDM kehumasan di OPD agar untuk lebih optimal dalam menyesuaikan perkembangan digital.
	Perkembangan Teknologi Informasi yang tidak bisa dikendalikan		Kurangnya Literasi dan Keterampilan Digital. (Tidak semua anggota organisasi atau masyarakat memiliki literasi digital dan keterampilan teknologi yang cukup. Sehingga kurangnya pemahaman tentang teknologi digital ini dapat menghambat penerimaan solusi digital dan penggunaannya.)	Tingkat literasi dan keterampilan digital masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya mampu merespon perkembangan teknologi informasi dan digital dengan baik.	Kesenjangan Akses dan Infrastruktur TIK	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan media secara bijaksana

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Belum berfungsinya PPID Pembantu di masing-masing OPD secara optimal		Kurangnya keterbukaan informasi publik kepada masyarakat yang membutuhkan informasi menjadi penyebab tidak terlaksananya implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008	Keterbukaan informasi menjadi peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), mendorong transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan	Tersedianya akses informasi yang mudah, adil serta keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah	Kurangnya optimalnya peran PPID pembantu yang ada di setiap OPD
	belum siapnya OPD dalam menampung dan menindaklanjuti pengaduan pelayanan public		Mewujudkan pengelolaan pengaduan yang mampu memberikan respon dan solusi cepat serta terpercaya menambah capaian indikator dan prosentase jumlah pengaduan	SP4N-LAPOR! menjadikan satu saluran pengaduan secara nasional untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduan dengan menerapkan kebijakan "No Wrong Door Policy" sebagai alat ukur atas tingkat kepuasan publik terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah	Kurangnya Pemerintah Daerah dan penyelenggara pelayanan publik lainnya untuk dapat segera terhubung dengan LAPOR agar penanganan pengaduan dapat terintegrasi secara optimal.	Penguatan pelayanan pengaduan pelayanan publik terpadu melalui koordinasi lintas perangkat daerah

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Konektivitas jaringan intra belum menjangkau seluruh perangkat daerah dan seluruh wilayah desa/kelurahan		Belum meratanya infrastruktur digital (internet, jaringan fiber, BTS) terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).	Penyediaan internet cepat dan berkualitas didesa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik	Infrastruktur yang Tidak Memadai (Beberapa organisasi mungkin menghadapi kendala dalam meng-upgrade atau mengganti infrastruktur mereka untuk mendukung transformasi digital. Ini dapat mencakup masalah terkait dengan biaya, kompleksitas, atau kesulitan teknis)	Masih rendahnya infrastruktur jaringan intra teknologi informasi dan komunikasi
	Data center (pusat data) sebagai penempatan data dan aplikasi pemerintah daerah belum memiliki standar (SNI) sebagaimana diamanatkan Pemerintah		Banyak data center milik Dinas Kominfo belum memenuhi standar nasional/internasional seperti Tier III, ISO 27001, atau belum memiliki sertifikasi pusat data nasional (PDN).	Belum terintegrasinya pusat data nasional dan transformasi digital daerah	Integrasi data yang memerlukan komitmen bersama (Ekosistem transformasi digital salah satunya merujuk pada penggunaan data bersama sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan)	Masih rendahnya infrastruktur pusat data teknologi informasi dan komunikasi

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Pengembangan aplikasi SPBE di perangkat daerah yang belum sesuai peta rencana		Aplikasi SPBE tidak terhubung satu sama lain karena perbedaan platform, format data, dan standar integrasi.	Rendahnya integrasi dan adopsi sistem digital dalam birokrasi.	Integrasi Sistem yang Rumit (Organisasi yang telah menggunakan sistem legacy yang sudah ada mungkin menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan solusi digital baru dengan sistem yang sudah ada. Keterbatasan interoperabilitas dapat menjadi hambatan)	Belum terintegrasinya sistem aplikasi SPBE antar perangkat daerah
	Layanan kedaruratan 112 belum terintegrasi dan terpadu dengan layanan di perangkat daerah dan belum menjangkau seluruh wilayah kabupaten		Call Center 112 sering tidak terintegrasi secara real-time dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Damkar, BPBD, Polisi, atau RSUD	Layanan 112 kadang berjalan terpisah dari sistem digitalisasi daerah atau command center	Banyak warga belum mengetahui fungsi 112 atau menganggap itu hanya untuk kebakaran	Penguatan kualitas layanan kedaruratan 112 yang terintegrasi
	belum adanya kebijakan, proses dan teknologi dalam pengamanan informasi		Kurangnya sinkronisasi antar kebijakan pusat dan daerah	Meningkatnya serangan siber, kebocoran data pribadi, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya keamanan digital	Ancaman keamanan informasi (Ancaman keamanan informasi di era digital merujuk pada potensi risiko dan bahaya yang dapat mempengaruhi keamanan data dan sistem komputer dalam lingkungan digital)	Penyusunan dan pelaksanaan sistem keamanan data

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Minimnya Pemanfaatan Data dalam Perumusan Kebijakan		Perumusan kebijakan lebih dominan berdasarkan intuisi, kepentingan politik, atau kebiasaan, bukan data dan bukti	Perumusan kebijakan tidak melibatkan data dari sektor lain atau analisis berbasis kajian ilmiah	Tantangan Pengelolaan Data (Volume besar data yang dihasilkan dalam lingkungan digital dapat menjadi tantangan dalam pengelolaan, analisis, dan pemanfaatan data secara efektif.)	(1) Keterbatasan Kapasitas SDM dalam Analisis Data (2) Kualitas Data yang Tidak Memadai
	belum adanya integrasi sistem aplikasi yang menghasilkan data		Tidak ada regulasi atau kebijakan formal yang mengatur proses integrasi, standar pengelolaan data, atau kewenangan pertukaran data antar OPD.	Data yang dibutuhkan tidak tersedia secara terbuka, belum terdokumentasi, atau tersebar di berbagai instansi tanpa mekanisme akses yang jelas.	Data yang dikumpulkan oleh berbagai instansi daerah sering kali tidak terintegrasi, menyebabkan inkonsistensi dan redundansi dalam pengelolaan informasi.	Belum terintegrasinya sistem aplikasi yang menghasilkan data. sehingga tidak bisa menyajikan data yang realtime

Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas 2025, sebagai berikut :

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) secara optimal sebagai upaya menciptakan budaya kerja dan kualitas kerja yang lebih efektivitas dan efisien.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan koneksi internet dan intranet pada 61 OPD (120 titik koneksi)</li> <li>Menyediakan koneksi free wifi pada 306 desa/kelurahan</li> <li>Menyediakan pusat data (ruang server) untuk memfasilitasi penempatan aplikasi layanan</li> </ul>	

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pemerintahan dan layanan publi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan aplikasi dan basis data layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi</li> <li>• Memfasilitasi IP Publik, penyelenggaraan subdomain OPD, email OPD, dan subdomain desa</li> <li>• Memfasilitasi koordinasi SPBE</li> <li>• Memfasilitasi penyelenggaraan layanan panggilan darurat 112</li> <li>• Memfasilitasi pemberian rekomendasi perizinan Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif (PBIP)</li> <li>• Penyusunan Masterplan Statistik dan Integrasi Data sektoral</li> <li>• Implementasi penguatan data sektoral berbasis digital</li> <li>• Peningkatan kualitas dan frekuensi data statistik</li> <li>• Penerapan dashboard untuk analisis kebijakan</li> <li>• Pengembangan</li> </ul>	

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			sistem statistik berbasis blockchain <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan risiko dan audit keamanan sandi</li> <li>• Penguatan CSIRT Jombangkab</li> <li>• Pengembangan SDM sandi bersertifikasi</li> <li>• Penilaian maturitas keamanan informasi (Indeks KAMI)</li> <li>• Penerapan teknologi keamanan berbasis blockchain</li> <li>• Partisipasi Publik dan Literasi Komunikasi</li> <li>• Evaluasi dan Rebranding Komunikasi Pemerintah</li> </ul>	
		Transformasi tata kelola pemerintahan yang lincah (agile) dan pelayanan publik menuju daya saing daerah yang kompetitif.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pegawai Pemerintah	

## 2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses usulan kegiatan dilakukan dari bawah dimulai dari Musrenbang tingkat Desa dilanjutkan tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Dalam prosesnya usulan dari desa diakomodir di tingkat kecamatan dan disesuaikan dengan usulan dari masing-masing SKPD yang disampaikan melalui Musrenbang Kecamatan. Hasil Musrenbang pada Dinas Kominfo Untuk tahun 2025 tidak ada usulan dari masyarakat.

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025**  
**Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jombang**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>NIHIL</b>					

## **BAB III**

### **PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi**

##### **Kebijakan Nasional**

Kebijakan Nasional tertuang dalam RPJPN 2025-2045 adalah **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional** Indonesia untuk periode 20 tahun, dari tahun 2025 hingga 2045. RPJPN ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang berisi visi, misi, arah kebijakan, dan strategi pembangunan jangka panjang guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Berikut adalah **tujuan, strategi, dan isi** dari **RPJPN 2025-2045** secara umum berdasarkan prinsip perencanaan pembangunan jangka panjang nasional Indonesia :

- Tujuan RPJPN 2025-2045
  1. Mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur pada tahun 2045;
  2. Mencapai Indonesia Emas 2045, yakni Indonesia yang berstatus negara maju dengan tingkat kesejahteraan rakyat yang tinggi;
  3. Menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara dan dunia;
  4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompetitif dan berdaya saing global;
  5. Mengurangi kesenjangan sosial dan geografis di seluruh wilayah Indonesia;
  6. Menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan;
  7. Memperkuat kedaulatan negara dan demokrasi yang sehat.
- Strategi RPJPN 2025-2045
  1. Pengembangan SDM Unggul: Fokus pada pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, inovasi, dan riset teknologi;
  2. Peningkatan Infrastruktur: Mempercepat pembangunan infrastruktur fisik dan digital di seluruh wilayah;
  3. Diversifikasi Ekonomi: Mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam dengan memperkuat sektor manufaktur, jasa, dan teknologi;
  4. Pemerataan Pembangunan: Mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan pengembangan wilayah tertinggal dan perdesaan;

5. Penguatan Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan: Mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan dalam setiap sector;
6. Reformasi Tata Kelola dan Sistem Pemerintahan: Meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat;
7. Penguatan Ketahanan Nasional: Menjaga stabilitas politik, keamanan, dan kedaulatan negara.

**Visi Pembangunan:** Indonesia Emas 2045 dengan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berdaulat. **Misi Pembangunan:** Pengembangan ekonomi berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup, dan penguatan demokrasi.

#### **Kebijakan dan Program Prioritas:**

1. Pengembangan pendidikan dan pelatihan;
2. Pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan teknologi informasi;
3. Penguatan ekonomi digital dan inovasi;
4. Pembangunan wilayah terintegrasi dan pemerataan kesejahteraan;
5. Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim.

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Digital mengacu pada Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yaitu : **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memiliki kebijakan strategis untuk mendukung transformasi digital nasional, sejalan dengan visi Indonesia Digital 2045. Berikut adalah sasaran strategis Komdigi:

#### 1. Peningkatan Infrastruktur Digital

- Pembangunan Jaringan Fiber Optik Nasional: Kominfo bekerja sama dengan operator telekomunikasi untuk menggelar jaringan fiber optik yang menghubungkan 514 kabupaten/kota, termasuk melalui program Palapa Ring Extension untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan jaringan.
- Penyediaan Satelit Multifungsi: Penggunaan satelit seperti SATRIA-1 dan SATRIA-2 untuk menyediakan akses internet di 150.000 titik layanan publik, termasuk di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
- Implementasi Teknologi 5G: Kominfo mempersiapkan regulasi, spektrum frekuensi, dan infrastruktur untuk mendukung implementasi 5G, sebagai bagian dari strategi menuju Indonesia Digital 2045.

#### 2. Pengembangan Ekonomi Digital

- Program 1000 Startup Digital: Memberdayakan kewirausahaan digital dengan membantu pendiri startup dari proses ide hingga pengembangan bisnis.
- Startup Studio Indonesia dan HUB.ID: Mendukung startup di tahap awal hingga pasca-seed untuk berkembang melalui pendanaan, jaringan mitra, dan akses pasar.
- UMKM Scaling Up: Membantu UMKM memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas akses pemasaran, meningkatkan daya saing, dan efisiensi operasional.

#### 3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Digital

- Pelatihan dan Sertifikasi Digital: Kominfo menyediakan program pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan keterampilan digital masyarakat, terutama di daerah 3T.
- Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Pemerintah Daerah: Mendorong kolaborasi untuk mempercepat pemerataan akses teknologi dan pengembangan talenta digital di seluruh wilayah Indonesia.

#### 4. Keamanan dan Etika Digital

- Pemutusan Akses Konten Negatif: Kominfo secara aktif menghapus dan memutus akses pada konten digital yang bermuatan negatif untuk menciptakan ruang digital yang aman dan produktif.
- Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN): Menerapkan standar pengukuran untuk memantau dan mengevaluasi progres transformasi digital di setiap daerah

Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Digital 2045, dengan fokus pada pemerataan akses, pengembangan ekonomi digital, peningkatan kualitas SDM, dan terciptanya ruang digital yang aman dan produktif.

### **Kebijakan Provinsi Jawa Timur**

Indikator Utama Pembangunan salah satunya adalah Transformasi Digital. RPJMN 2025-2029 adalah tahapan pertama dalam RPJPN 2025-2045 dimana menjadi tahap awal transformasi Indonesia melalui Perkuatan Fondasi Transformasi. Indonesia akan menghadapi Mega Trend 2045 dimana teknologi akan menggantikan 40% pekerjaan eksisting yang ada saat ini. Perkembangan Artificial Intelligence, Internet of things, big data, data science dan cyber security adalah hal-hal yang tidak dapat dihindari di masa depan. Sehingga membangun ekosistem transformasi digital menjadi keharusan sebagai upaya untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi pada lingkungan eksternal, pelayanan publik berbasis digital yang lebih baik, strategi mengatasi ancaman keamanan siber dan pengambilan keputusan Pemerintah yang lebih tepat sasaran berbasis data.

Visi Indonesia Digital mencerminkan upaya pemerintah untuk menjadikan teknologi digital sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional, dengan fokus pada inklusi digital, pembangunan ekonomi berbasis teknologi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Transformasi digital akan mencakup berbagai aspek (pengembangan teknologi, penguatan infrastruktur digital,

pengembangan SDM dan peningkatan literasi digital) untuk meningkatkan efisiensi, layanan publik, keamanan siber, pemanfaatan data dan mendukung pembangunan sektor informasi dan komunikasi, data statistik serta persandian dan keamanan informasi. Adapun beberapa isu strategis nasional yang akan ditindaklanjuti dalam rangka mendukung transformasi digital di Jawa Timur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. E-Government : Menerapkan solusi e-government untuk menyederhanakan proses administrasi, memberikan layanan publik secara online, dan meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat.
2. Pengembangan Infrastruktur Digital : Investasi dalam pengembangan infrastruktur digital, termasuk penyediaan akses internet yang cepat dan terjangkau di seluruh perangkat daerah.
3. Keamanan Siber : Peningkatan keamanan siber untuk melindungi sistem dan data kritis. Ini melibatkan pengembangan kebijakan keamanan siber, pelatihan personel, dan penggunaan teknologi keamanan mutakhir.
4. Pengelolaan Data : Implementasi strategi pengelolaan data yang efisien untuk memastikan keandalan, ketersediaan, dan keamanan data yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Inovasi Teknologi : Mendorong inovasi teknologi dengan mengadopsi kecerdasan buatan, analitika data, dan teknologi terkini lainnya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan.
6. Pelibatan Masyarakat Digital : Membangun komunitas digital dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan dan program yang berkaitan dengan sektor informasi dan komunikasi.
7. Pendidikan Digital : Memperkuat pendidikan digital untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat. Ini melibatkan pelatihan dan pendidikan mengenai penggunaan teknologi informasi dan keamanan siber.
8. Kolaborasi dengan Sektor Swasta : Berkolaborasi dengan perusahaan swasta dan sektor lainnya untuk mengakselerasi transformasi digital. Kemitraan ini dapat melibatkan pengembangan proyek bersama, investasi, dan pertukaran sumber daya.
9. Pengembangan Aplikasi dan Platform Digital : Membangun aplikasi dan platform digital yang mendukung layanan publik, komunikasi, dan transparansi informasi. Transformasi digital ini tidak hanya mencakup penggunaan teknologi, tetapi juga melibatkan perubahan budaya, kebijakan, dan keterlibatan aktif dengan

pemangku kepentingan yang beragam.

Dengan melakukan transformasi digital ini, diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menjadi motor penggerak untuk pembangunan sektor informasi dan komunikasi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2026 sebagai perumusan fokus program dan kegiatan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya. Adapun tujuannya meliputi :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan SDM Aparatur Yang Berkualitas Indikatornya adalah : Indeks Pembangunan Statistik
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis Digital Dan Terintegrasi Indikatornya adalah : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

Sedangkan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Statistik yang Terpercaya dan Berkualitas
2. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur
3. Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2026 sebagai berikut :

- Sasaran 1 memiliki 1 indikator : Persentase perangkat daerah yang memenuhi ketersediaan data statistik sektoral
- Sasaran 2 memiliki 1 indikator : Indeks masyarakat digital
- Sasaran 3 memiliki 1 indikator : Pengukuran Kesadaran Sumber Daya Manusia terhadap Keamanan Informasi Pemprov. Jatim
- Sasaran 4 memiliki 1 indikator : Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur 2025

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan dan SDM Aparatur yang berkualitas	Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral melalui rencana pengumpulan data yang terstruktur, pemantauan kualitas data, transparansi dalam metodologi, validasi dan verifikasi data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan kebijakan yang mendorong pemerintah untuk mempublikasikan data secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat</li> <li>• Mendorong standarisasi dalam pengelolaan data, format, dan protokol komunikasi untuk meningkatkan interoperabilitas antara sistem-sistem pemerintah.</li> </ul>
Meningkatnya pelayanan publik berbasis digital dan terintegrasi	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur	Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memberikan kontribusi dalam transparansi, aksesibilitas, interaktivitas publik, dan layanan infrastruktur pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan infrastruktur TIK yang handal dan cepat untuk mendukung layanan online dan aplikasi pemerintah.</li> <li>• Mendorong standarisasi dalam pengelolaan data, format, dan protokol komunikasi untuk meningkatkan interoperabilitas antara sistem-sistem pemerintah.</li> <li>• Mendorong pengembangan aplikasi dan layanan publik yang dapat</li> </ul>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			diakses melalui perangkat seluler dan web.
	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi	Meningkatkan kesadaran keamanan informasi dan kepatuhan perangkat daerah terhadap kebijakan keamanan informasi dilingkungan Pemprov. Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan kebijakan keamanan informasi yang ketat untuk melindungi data pribadi dan keamanan infrastruktur;</li> <li>• Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov. Jawa Timur</li> </ul>
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur	Mengoptimalkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur

## Kebijakan Kabupaten Jombang

Visi pembangunan daerah Kabupaten Jombang untuk periode RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut:

### **“MEWUJUDKAN JOMBANG MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”**

Visi tersebut menggambarkan harapan bahwa Kabupaten Jombang pada masa yang akan datang (tahun 2029) telah mengalami kemajuan di berbagai bidang yang mengindikasikan kesejahteraan untuk semua atau untuk seluruh masyarakat Jombang tanpa terkecuali. Penjelasan visi yang dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam dua pokok visi berikut:

#### **1. Maju**

Maju mengandung makna kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Jombang yang cerdas, berdaya saing, berbudaya, religius, sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu terlibat aktif dalam proses pembangunan serta transformasi sosial yang inklusif, harmonis dan berkelanjutan.

## 2. Sejahtera

Sejahtera bermakna kondisi Kabupaten Jombang di tahun 2029 yang terpenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, ditandai dengan kemandirian ekonomi daerah dan masyarakat, ketahanan sosial, peningkatan kualitas kehidupan yang ditopang dengan tata kelola pemerintahan transformatif yang bersih dan melayani, efektif dan efisien, serta transparan.

Misi Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 harus mendukung tercapainya visi “**Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera Untuk Semua**”. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jombang yang telah ditetapkan, maka misi pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas, berbudi pekerti luhur, religius dan berdaya saing global.** Misi ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Jombang yang mampu mendukung proses transformasi sosial yang inklusif, adaptif dan inovatif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fokus dari penyelenggaraan misi ini adalah pada pembangunan kualitas sumberdaya manusia, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun sosial lainnya, termasuk di dalamnya penurunan kemiskinan dan perlindungan masyarakat dari bencana.
2. **Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah secara berkesinambungan.** Misi ini diselenggarakan melalui diversifikasi ekonomi dan hilirisasi sumber daya unggulan berbasis teknologi, meningkatkan kontribusi sektor-sektor unggulan, penciptaan ekonomi kreatif, green economy, bisnis rintisan start up dan marketplace. Bentuk nyata penyelenggaraannya berupa peningkatan produksi dan produktivitas sektor-sektor perekonomian Kabupaten Jombang (khususnya sektor unggulan) dan investasi daerah, peningkatan pendapatan kelompok masyarakat (khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah) sehingga mampu memperkecil kesenjangan pendapatan, serta penciptaan stabilitas harga yang mampu mempertahankan dan/atau meningkatkan daya beli masyarakat.
3. **Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.** Misi ini dilakukan melalui penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas dan berwawasan lingkungan, baik infrastruktur kawasan permukiman, pekerjaan umum maupun perhubungan. Arah pengembangan infrastruktur difokuskan pada; (1) pemenuhan infrastruktur wajib dasar; (2) kawasan yang memiliki potensi untuk

berkembangan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru; (3) pengembangan infrastruktur jalan yang berdampak pada peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Misi ini juga berfokus pada upaya-upaya menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat sehingga diharapkan mampu memitigasi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan rendahnya/menurunnya kualitas lingkungan hidup.

4. **Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya berbasis kearifan lokal.** Misi ini diselenggarakan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang aman, nyaman dan menghargai perbedaan (harmoni sosial). Pembangunan ketahanan sosial, khususnya pada penciptaan masyarakat yang agamis, tertib, tentram dan terlindungi serta rukun menjadi fokus dalam penyelenggaraan misi ini. Pembangunan budaya dan kesetaraan gender juga merupakan fokus lainnya dari misi ini.
5. **Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif.** Transformasi tata kelola pemerintahan ini diselenggarakan melalui transformasi digital dan perluasan partisipasi publik. Fokus penyelenggaraan dari misi adalah pada perluasan akses dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui digitalisasi atau optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di dalamnya. Selain itu, menciptakan kebijakan publik dan membangun perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, serta aparatur sipil negara yang profesional, juga menjadi fokus dalam penyelenggaraan misi ini.

### **Strategi dan Arah Kebijakan berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>MISI 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas, berbudi pekerti luhur, religius dan berdaya saing global</b>			
<b>1</b> Terciptanya SDM yang berkualitas dan tingkat kesejahteraan sosial yang merata.	<b>1</b> Terwujudnya SDM yang sehat, produktif, berkualitas, dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, baik primer maupun rujukan, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, serta pemasyarakatan olahraga yang diprioritaskan di wilayah kecamatan tertinggal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrasi program lintas sektoral untuk mempercepat perluasan akses layanan kesehatan secara bertahap difokuskan di wilayah kecamatan tertinggal (titik kemiskinan).</li> </ul>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi pengendalian jumlah penduduk melalui Keluarga Berencana (KB), serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan di wilayah kecamatan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan peran puskesmas dan puskesmas pembantu dalam perluasan jangkauan edukasi dan implementasi KB dan perlindungan perempuan dan anak.</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat melalui fasilitasi peningkatan budaya membaca dan pengelolaan pendidikan formal dan non formal tingkat prasekolah hingga sekolah menengah (sesuai kewenangan kabupaten), baik pada operasional sekolah, siswa, kurikulum, maupun tenaga pendidik dan kependidikan di seluruh wilayah kecamatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrasi program lintas sektoral untuk mempercepat perluasan akses layanan pendidikan secara bertahap di seluruh wilayah kecamatan.</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan partisipasi / peran /pemberdayaan pemuda dalam pembangunan (ekonomi maupun sosial) di seluruh wilayah kecamatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan prestasi kepemudaan dan keolahragaan serta peran strategis dalam pembangunan.</li> </ul>	
	2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan penyelenggaraan layanan penyediaan jaminan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi PPKS di wilayah kecamatan dengan kategori terbelakang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrasi program lintas sektoral untuk mempercepat perluasan akses layanan kesehatan secara bertahap difokuskan di wilayah kecamatan tertinggal (titik kemiskinan).</li> </ul>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan perlindungan pada masyarakat melalui upaya mitigasi dan penanganan dampak berbagai bentuk bencana daerah di kecamatan rawan bencana.</li> <li>Manajemen data penduduk dan kemiskinan yang akurat / valid berbasis desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan penanganan bencana berbasis masyarakat melalui peningkatan resiliensi terhadap bencana.</li> <li>Percepatan satu data Indonesia di wilayah kabupaten secara bertahap.</li> </ul>		
<b>MISI 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah secara berkesinambungan.</b>					
2	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	3	Meningkatnya PDRB sektor unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor unggulan Jombang, pengembangan pariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah, pertanian (dalam arti luas), industri pengolahan, perdagangan, dan jasa di seluruh wilayah kecamatan.</li> <li>Penguatan unsur pendukung ketahanan (ketersediaan, distribusi dan keamanan) pangan daerah/masyarakat di wilayah kecamatan penghasil produk pertanian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hilirisasi komoditas unggulan daerah agar berdampak pada peningkatan nilai tambah petani.</li> <li>Menciptakan daya dukung bagi pengembangan industri dan perdagangan.</li> </ul>
		4	Meningkatnya Investasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menciptakan situasi kondusif untuk investasi daerah (meningkatkan daya saing berinvestasi) melalui kemudahan perizinan / berinvestasi, kebijakan yang mendukung, dan promosi investasi di wilayah kecamatan strategis daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemetaan dan perlindungan produk pangan lokal potensial dan diversifikasi pangan secara bertahap.</li> <li>Kebijakan selektif terhadap jenis investasi yang diprioritaskan pada investasi padat karya atau yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja.</li> </ul>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
	5	Meningkatnya pemerataan pendapatan kelompok masyarakat menengah dan perdesaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperluas kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar kerja (<i>link and match</i> kualitas tenaga kerja dengan kebutuhan) di berbagai sektor, khususnya di usaha perdagangan-jasa, industri dan ekonomi kreatif, dan lain-lain yang memberikan nilai tambah tinggi di kecamatan yang memiliki aktivitas industri.</li> <li>Membangun perdesaan melalui penguatan ekonomi lokal berbasis potensi desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan desa, serta peningkatan pelayanan dasar di desa dan kerjasama desa di seluruh kecamatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan (user) untuk memastikan kualifikasi angkatan kerja telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan.</li> <li>Stimulus peningkatan kapasitas pemerintah desa yang dilakukan simultan dengan pengembangan ekonomi lokal dan layanan dasar.</li> </ul>	
<b>MISI 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan, pengembangan kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan</b>					
3	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan	6	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kawasan pemukiman dan rumah layak huni, mencakup sanitasi, air minum, jaringan drainase, maupun sarana prasarana dan utilitas umum di kecamatan wilayah perkotaan.</li> <li>Meningkatkan fasilitasi rumah bagi korban bencana serta resiliensi masyarakat terhadap bencana di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Difokuskan pada pemenuhan SPM perumahan permukiman sebagai komitmen pemerintah daerah yang dilakukan dengan peningkatan layanan utilitas sarana prasarana perkotaan yang maju.</li> <li>Sinergi program vertikal dan horizontal untuk percepatan penanganan bencana secara cepat dan tepat.</li> </ul>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		kecamatan yang tertimpa bencana.	
	7 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percepatan penyediaan maupun pemeliharaan jalan, jembatan dan infrastruktur sumberdaya air di kecamatan dengan potensi ekonomi dan pariwisata yang tinggi.</li> <li>Melakukan terobosan untuk penyelenggaraan tata ruang secara konsisten dan sesuai ketentuan di seluruh kecamatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percepatan akses konektivitas dan mobilitas antar wilayah strategis yang difokuskan untuk pengembagn ekonomi dan pengembangan potensi lokal yang diimbangi dengan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang.</li> </ul>
	8 Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percepatan pemenuhan kelengkapan jalan pendukung kriteria jalan berkeselamatan di wilayah kecamatan dengan kualitas jalan di bawah standar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penanggulangan jalan dengan tingkat resiko sesuai dengan pemetaan jenis jalan berdasarkan resiko keselamatan secara bertahap.</li> </ul>
	9 Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan upaya mitigasi/pencegahan serta penyelesaian kerusakan lingkungan hidup dari pencemaran air, udara, dan tanah - termasuk di dalamnya pengelolaan persampahan di kecamatan perkotaan.</li> <li>Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian sumber pencemaran lingkungan dan persampahan di kawasan berbasis risiko dengan melibatkan seluruh stakeholder masyarakat.</li> <li>Implementasi aktivitas yang dapat mendukung perlindungan keanekaragaman hayati.</li> </ul>
<b>MISI 4: Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya berbasis kearifan lokal.</b>			
4	Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya berbasis kearifan lokal.	10 Terwujudnya kenyamanan dan kesalehan sosial dalam masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kolaborasi / kerjasama pemerintah daerah dengan unsur kelembagaan masyarakat untuk berperan aktif menciptakan Jombang yang aman, kondusif, dan demokratis melalui optimalisasi</li> <li>Perluasan jangkauan sosialisasi mengenai nilai-nilai kerukunan antara kelompok masyarakat secara konsisten dan melibatkan unsur pemuda.</li> <li>penguatan sosialisasi perda / perkara kepada seluruh</li> </ul>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		layanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan, peningkatan kerukunan hidup beragama dan kehidupan demokratis, serta pelestarian budaya dan kearifan lokal di seluruh kecamatan.	masyarakat untuk menekan pelanggaran dan penciptaan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.
<b>MISI 5: Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif (open &amp; collaborative governance), melayani, akuntabel, bersih dan bebas korupsi.</b>			
5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berbasis Digital serta pelayanan publik merata.	11 Terwujudnya transformasi birokrasi berbasis digital.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (digitalisasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik (optimalisasi penciptaan sistem pemerintahan berbasis elektronik) di seluruh Perangkat Daerah.</li> <li>Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) secara optimal sebagai upaya menciptakan budaya kerja dan kualitas kerja yang lebih efektivitas dan efisien.</li> </ul>
		12 Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan dengan ASN yang profesional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transformasi tata kelola pemerintahan yang lincah (agile) dan pelayanan publik menuju daya saing daerah yang kompetitif.</li> <li>Penerapan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis teknologi untuk menekan kebocoran dan pengabaian kewajiban membayar pajak dan retribusi oleh wajib pajak.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah dan optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset dan keuangan daerah.</li> </ul>	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil riset dan optimalisasi pemanfaatannya untuk penciptaan inovasi di seluruh perangkat daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan riset dan inovasi yang difokuskan untuk dasar kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah.</li> </ul>
	13 Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi pengelolaan (perencanaan- implementasi-monev-peningkatan) kebijakan publik di berbagai bidang sesuai kebutuhan terkini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di seluruh perangkat daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Restrukturisasi kebijakan daerah yang difokuskan untuk meningkatkan dampak positif pelaksanaan program perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah.</li> </ul>

## 3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

### 3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sehingga rumusannya menunjukkan kondisi yang akan dicapai.

Adapun tujuannya meliputi :

#### **“Terbangunnya Ekosistem Teknologi, Informasi dan Komunikasi”**

Tujuan RPJMD Kabupaten Jombang pada Tahun 2025-2029 meliputi :

1. Terciptanya SDM yang berkualitas dan tingkat kesejahteraan sosial yang merata;
2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
3. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan;
4. Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya berbasis kearifan lokal;
5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berbasis Digital serta pelayanan publik merata;

Untuk mendukung Tujuan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 maka Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung tujuan ke-5 yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berbasis Digital serta pelayanan publik merata”.

### 3.2.2. Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian dari proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan mendasarkan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Tujuan dan sasaran jangka

menengah yang akan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Optimalnya pemanfaatan TIK untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi;
2. Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik;
3. Optimalnya data statistik sektoral;
4. Optimalnya penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi.

Sasaran kinerja Dinas Kominfo yang telah direncanakan disusun indikator kinerja dan formulasi perhitungannya. Perhitungan formulasi tersebut adalah sebagai berikut:

**FORM TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya transformasi birokrasi berbasis digital.	Terbangunnya Ekosistem Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Optimalnya pemanfaatan TIK untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi	Indeks SPBE terkait Layanan Komunikasi dan Informatika	2.88	2.94	3,00	3,10	3,16	3,22	
		Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Optimalnya data statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	
		Optimalnya penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	Indeks KAMI	640	690	710	720	730	740	
Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan dengan ASN yang profesional		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	80.10	80,15	80.20	80,25	80.30	80,35	

**Keselarasn Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dengan Kebijakan Nasional, Kementerian Komunikasi dan Digital dan Kominfo Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029**

Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Jombang	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang
<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur pada tahun 2045;</li> <li>2. Mencapai Indonesia Emas 2045, yakni Indonesia yang berstatus negara maju dengan tingkat kesejahteraan rakyat yang tinggi;</li> <li>3. Menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara dan dunia;</li> <li>4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompetitif dan berdaya saing global;</li> <li>5. Mengurangi kesenjangan sosial dan geografis di seluruh wilayah Indonesia;</li> <li>6. Menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan;</li> <li>7. Memperkuat kedaulatan negara dan demokrasi yang sehat.</li> </ol>	<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan SDM Aparatur Yang Berkualitas Indikatornya adalah : Indeks Pembangunan Statistik</li> <li>2. Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis Digital Dan Terintegrasi Indikatornya adalah : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Keamanan Informasi (KAMI)</li> </ol>	<p>Tujuan :</p> <p>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berbasis Digital serta pelayanan publik merata;</p>	<p>Tujuan :</p> <p>Terbangunnya Ekosistem Teknologi, Informasi dan Komunikasi</p>

Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Jombang	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang
<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Infrastruktur Digital;</li> <li>2. Pengembangan Ekonomi Digital;</li> <li>3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Digital;</li> <li>4. Keamanan dan Etika Digital</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Statistik yang Terpercaya dan Berkualitas;</li> <li>2. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur;</li> <li>3. Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi</li> <li>4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.</li> </ol>	<p>Sasaran :</p> <p>Terwujudnya transformasi birokrasi berbasis digital.</p>	<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalnya pemanfaatan TIK untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi;</li> <li>2. Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik</li> <li>3. Optimalnya data statistik sektoral</li> <li>4. Optimalnya penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi</li> <li>5. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah</li> </ol>

### 3.3. Perubahan Program dan Kegiatan

- a. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Pelaksanaan Perubahan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya Pemerintah kabupaten Jombang dalam mencapai target, sasaran pembangunan dan arah kebijakan di tahun 2025 yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kominfo Tahun 2025-2029. Program pembangunan Dinas Kominfo tahun 2025 pada dasarnya menselaraskan prioritas Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2025.

Adapun faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan diantaranya :

- a. Mengakomodir visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Jombang.
- b. Penanganan Isu Strategis Nasional dan Daerah yang harus segera ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan yaitu:
  - Penguatan Sumber Daya Manusia, pendidikan, dan kesehatan;
  - Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
  - Pencegahan stunting dan kemiskinan;
  - Pengendalian Inflasi;
  - Peningkatan pertumbuhan ekonomi;
  - Dukungan swasembada pangan;
  - Koperasi Merah Putih;
  - Sekolah Rakyat.
- c. Pencapaian target Sustainable Development Goals (SDG's) sebagaimana diamanatkan ketentuan perundang-undangan;
- d. Akselerasi dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Kementerian;
- e. Menindaklanjuti kebijakan Nasional dan Provinsi yang harus dialokasikan di daerah.

**Bahan pertimbangan perubahan program dan kegiatan, meliputi :**

#### **1. Pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals)**

Pencapaian **Sustainable Development Goals (SDGs)** oleh **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang** berperan penting dalam mendorong

keterbukaan informasi, digitalisasi layanan publik, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan transparan. Meskipun Diskominfo Kabupaten Jombang bukan lembaga pelaksana langsung untuk seluruh target SDGs, perannya sangat strategis sebagai *enabler* (pendukung) transformasi digital yang mempercepat capaian berbagai tujuan SDGs.

## **Peran dan Pencapaian Diskominfo terhadap SDGs**

### **1. SDG 9 – Industri, Inovasi, dan Infrastruktur**

Kontribusi berupa Pembangunan infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) melalui :

- Pengembangan jaringan **fiber optic, command center, dan data center.**
- Penerapan **e-Government dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)**

### **2. SDG 16 – Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh**

Kontribusi berupa Transparansi informasi publik dan pelayanan pengaduan masyarakat, melalui :

- Implementasi Layanan Call Center 112 untuk pengaduan darurat dan non-darurat.
- Menerapkan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).
- Menyediakan akses keterbukaan informasi publik melalui website dan media sosial.

### **3. SDG 11 – Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan**

Kontribusi: Implementasi konsep Smart City, melalui :

- Diskominfo menjadi motor integrasi data antar OPD melalui Masterplan Smart City;
- Pengembangan aplikasi layanan publik digital (izin online, pajak, kependudukan, dst);
- Edukasi publik tentang pemanfaatan layanan digital secara inklusif.

### **4. SDG 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan**

Kontribusi: Kolaborasi antarlembaga dan publik, melalui :

- Berperan dalam membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan media;
- Mendorong kolaborasi pengembangan aplikasi/aplikasi bersama antar daerah;
- Menyediakan platform komunikasi publik antar instansi.

Keterkaitan tujuan SDGs dengan tujuan pembangunan nasional dengan Dinas Kominfo Kabupaten Jombang mendukung pencapaian SDGs secara teknis melalui digitalisasi dan penyebaran informasi.

## **2. Pengentasan kemiskinan**

Dukungan **Dinas Komunikasi dan Informatika** dalam pengentasan kemiskinan memang tidak langsung bersifat bantuan tunai atau pemberdayaan ekonomi, tapi sangat **strategis** dalam aspek **komunikasi, teknologi, dan informasi publik** melalui **Digitalisasi Data Kemiskinan & Integrasi Layanan**. Diskominfo bekerja sama dengan Bappeda, Dinsos, dan Disdukcapil untuk integrasi **data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)** ke sistem digital.

## **3. Pencapaian SPM**

Standar pelayanan minimal atau SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM Dinas Sosial Kabupaten Jombang yang harus diwujudkan yaitu :

1. Fasilitasi Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
2. Fasilitasi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Fasilitasi Permohonan Informasi Publik;
4. Fasilitasi Pengurusan Tanda Tangan Elektronik;
5. Fasilitasi Data Statistik Sektoral;
6. Fasilitasi Call Center Jombang 112 Siaga!
7. Fasilitasi Pengaduan SP4N LAPOR!

## **b. Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, antara lain meliputi :**

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 terdiri dari enam (5) program, sebelas (11) kegiatan, dan tiga puluh tujuh (37) sub kegiatan dengan jumlah pagu APBD 2025 sebesar Rp.25.172.214.207, dan pada P-APBD 2025 naik sebesar Rp. 20,966,314,681 menjadi sebesar Rp. 24,340,787,745 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)

Perubahan Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kominfo Kabupaten Jombang Tahun 2025 sebagai berikut :

**PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2025**

Nama PD: **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG**

Kode	Usuran/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I		K	Rp	K	Rp	
					K	Rp	K	Rp					
2		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1 6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	3 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1 6	000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	3 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1 6	0 1 2.0 1 000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	5 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

						Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
2	1	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	N/A	32 Orang/bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	32 Orang/bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	N/A	4 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	1 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	N/A	100 Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	N/A	12 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

2	1	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor yang Disediakan	N/A	12 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	6 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	5 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	N/A	3 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	5 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	N/A	1 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	17 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	2 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	63 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

2	1	0	2.0		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Persentase PD yang telah memiliki layanan informasi	N/A	10%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase masyarakat dan PD yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	N/A	3,3%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	N/A	3 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	N/A	3 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	000	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	N/A	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0		<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain</b>	Jumlah PD yang terkoneksi jaringan intranet	N/A	53 Perangkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

					<b>di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>												
2	1	0	2.0	000	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	1	0	2.0		<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi</b>	<b>N/A</b>	<b>2 Aplikasi</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2	1	0	2.0	000	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	1	0	2.0	000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	N/A	1 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	1	0	2.0	000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan	N/A	1 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

						Daerah yang Dikelola											
2	1	0	2.0	000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	N/A	2 Aplikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	N/A	2 Layanan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	N/A	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	001	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	N/A	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase data Sektoral yang dipublikasikan</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	

2	1	0	2.0		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang digunakan dalam portal satu data	N/A	28 Data	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	N/A	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	N/A	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	000	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	N/A	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	000	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	N/A	1 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase Sistem aplikasi strategis yang berfungsi dengan baik</b>	<b>N/A</b>	<b>50%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	
2	1	0	2.0		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan layanan keamanan kominfo	N/A	53 Perangkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan	N/A	1 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

					Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan													
2	1	0	2.0	000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	N/A	1 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	N/A	53 Perangkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>																			
2	1	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>9.487.819.793</b>	<b>25%</b>	<b>2.576.476.060</b>	<b>100%</b>	<b>11.170.531.957</b>	<b>100%</b>	<b>1.682.712.164</b>			
2	1	0	2.0		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>27.603.000</b>	<b>25%</b>	<b>14.961.000</b>	<b>100%</b>	<b>38.851.000</b>	<b>100%</b>	<b>11.248.000</b>			

2	1	0	2.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	N/A	3 Dokumen	12.623.000	1 Dokumen	10.021.000	3 Dokumen	17.727.000	3 Dokumen	5.104.000
2	1	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	N/A	5 Laporan	14.980.000	1 Laporan	4.940.000	5 Laporan	21.124.000	5 Laporan	6.144.000
2	1	0	2.0		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>32 Orang/Bulan</b>	<b>5.777.455.201</b>	<b>32 Orang/bulan</b>	<b>1.406.972.669</b>	<b>32 Orang/Bulan</b>	<b>5.899.622.044</b>	<b>32 Orang/Bulan</b>	<b>122.166.843</b>
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	N/A	32 Orang/Bulan	5.575.119.201	32 Orang/Bulan	1.400.126.669	32 Orang/Bulan	5.715.508.044	32 Orang/Bulan	<b>140.388.843</b>
2	1	0	2.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	N/A	N/A	4 Dokumen	199.976.000	1 Dokumen	4.764.000	4 Dokumen	181.754.000	4 Dokumen	<b>-18.222.000</b>
2	1	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	N/A	N/A	1 Laporan	2.360.000	1 Laporan	2.082.000	1 Laporan	2.360.000	1 Laporan	<b>0</b>

						Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
2	1	0	2.0		Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	N/A	N/A	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0 Paket	0
2	1	0	2.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	N/A	N/A	100%	0	0	107.874.193	100%	0	100%	0
2	1	0	2.0		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>12 Paket</b>	<b>333.985.340</b>	<b>3 Paket</b>	<b>8.007.500</b>	<b>12 Paket</b>	<b>455.471.818,00</b>	<b>12 Paket</b>	<b>121.486.478,00</b>
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		N/A	N/A	12 Paket	13.819.800	3 Paket	12.819.800	12 Paket	13.819.800	12 Paket	0
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	6 Paket	62.088.100	1 Paket	18.210.000	6 Paket	62.088.578	6 Paket	478
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	3 Dokumen	132.778.400	0 Paket	6.681.150	3 Dokumen	132.778.400	3 Dokumen	0
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	N/A	3 Dokumen	46.080.440	3 Dokumen	1.910.000	3 Dokumen	46.080.440	3 Dokumen	0
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	N/A	N/A	5 Laporan	12.612.000	1 Laporan	60.245.743	5 Laporan	12.612.000	5 Laporan	0

						yang Disediakan											
2	1	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	N/A	100%	66.606.600		178.358.665	100%	188.092.600	100%	121.486.000	
2	1	0	2.0		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>770.906.900</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>177.858.665</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>821.390.900</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>50.484.000</b>	
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	N/A	12 Laporan	393.000.000	3 Laporan	83.667.458	12 Laporan	404.920.000	12 Laporan	11.920.000	
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	100%	377.906.900		94.191.207	100%	416.470.900	100%	38.564.000	
2	1	0	2.0		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>2.577.869.352</b>	<b>25%</b>	<b>866.629.533</b>	<b>100%</b>	<b>3.955.196.195</b>	<b>100%</b>	<b>1.377.326.843</b>	

2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	N/A	1 Unit	47.540.000	1 Unit	3.845.000	1 Unit	47.540.000	1 Unit	0
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	N/A	17 Unit	196.075.110	17 Unit	35.485.000	17 Unit	220.100.000	17 Unit	24.024.890
2	1	0	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	N/A	2 Unit	106.338.000	2 Unit	69.320.533	2 Unit	187.837.000	2 Unit	81.499.000
2	1	0	2.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	N/A	63 Unit	2.227.916.242	63 Unit	757.979.000	63 Unit	3.499.719.195	63 Unit	1.271.802.953
2	1	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki layanan informasi</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>10 %</b>	<b>2.272.108.850</b>	<b>10%</b>	<b>755.198.164</b>	<b>10 %</b>	<b>3.465.713.750</b>	<b>10 %</b>	<b>1.193.604.900</b>
2	1	0			<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase masyarakat dan PD yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>3.4%</b>	<b>2.272.108.850</b>	<b>2%</b>	<b>755.198.164</b>	<b>3.4%</b>	<b>3.465.713.750</b>	<b>3.4%</b>	<b>1.193.604.900</b>

2	1	0	2.0	001	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	N/A	N/A	3 Laporan	1.614.060.880	3 Laporan	581.080.864	3 Laporan	2.600.165.780	3 Laporan	<b>986.104.900</b>
2	1	0	2.0	001	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	N/A	N/A	100%	125.174.190	25%	40.468.600	100%	146.174.190	100%	21.000.000
2	1	0	2.0	002	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	N/A	N/A	100%	532.873.780	25%	133.648.700	100%	719.373.780	100%	186.500.000
2	1	0	2.0		<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>7.165.346.065</b>	<b>25%</b>	<b>317.543.756</b>	<b>100%</b>	<b>7.636.502.065</b>	<b>100%</b>	<b>471.156.000</b>
2	1	0	2.0		<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat</b>	<b>Jumlah PD yang terkoneksi jaringan intra</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>53 Perangkat</b>	<b>55.771.920</b>	<b>53 Perangkat</b>	<b>14.795.202</b>	<b>53 Perangkat</b>	<b>76.771.920,00</b>	<b>53 Perangkat</b>	<b>21.000.000,00</b>

					<b>dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>											
2	1	0	2.0	000	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	N/A	N/A	1 Dokumen	55.771.920	1 Dokumen	14.795.202	1 Dokumen	76.771.920,00	1 Dokumen	21.000.000,00
2	1	0	2.0		Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi	N/A	N/A	2 Aplikasi	7.109.574.145	0 aplikasi	302.748.554	2 Aplikasi	7.559.730.145	2 Aplikasi	450.156.000
2	1	0	2.0	001	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	N/A	N/A	10 Aplikasi	350.000.000	0 Aplikasi	0	10 Aplikasi	602.556.000	10 Aplikasi	252.556.000
2	1	0	2.0	001	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	N/A	N/A	1 Laporan	253.479.145	0 Aplikasi	52.300.000	1 Laporan	294.199.145	1 Laporan	40.720.000
2	1	0	2.0	002	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE	N/A	N/A	10 Aplikasi	747.717.500	0 Laporan	101.650.000	10 Aplikasi	706.997.500	10 Aplikasi	-40.720.000

2	1	0	2.0	002	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	pemerintah daerah Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	N/A	N/A	2 Aplikasi	84.650.000	0 Aplikasi	0	2 Aplikasi	84.650.000	2 Aplikasi	0
2	1	0	2.0	002	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	N/A	N/A	53 Perangkat	803.270.000	53 Perangkat	66.854.000	53 Perangkat	837.870.000	53 Perangkat	34.600.000
2	1	0	2.0	002	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	N/A	N/A	1 Program	2.500.670.000	1 Program	47.375.000	1 Program	2.663.670.000	1 Program	163.000.000
2	1	0	2.0	002	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	N/A	N/A	4 Aplikasi	69.787.500	1 Aplikasi	34.569.554	4 Aplikasi	69.787.500	4 Aplikasi	0
2	1	0	2.0	003	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	N/A	N/A	53 Perangkat	2.300.000.000	53 Perangkat	0	53 Perangkat	2.300.000.000	53 Perangkat	0
2	1	0			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN</b>	<b>Persentase data Sektoral yang dipublikasikan</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>1.318.374.148</b>	<b>25%</b>	<b>957.497.347</b>	<b>100%</b>	<b>1.345.374.148</b>	<b>100%</b>	<b>27.000.000</b>

					<b>STATISTIK SEKTORAL</b>												
2	1	0	2.0		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah data statistik sektoral yang digunakan dalam portal satu data</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>28 Data</b>	<b>1.318.374.148</b>	<b>28 Data</b>	<b>957.497.347</b>	<b>28 Data</b>	<b>1.345.374.148</b>	<b>28 Data</b>	<b>27.000.000</b>	
2	1	0	2.0	000	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	N/A	N/A	70 %	141.350.500	70 %	4.885.000	70 %	141.350.500	70 %		0
2	1	0	2.0	000	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	N/A	N/A	100 Persentase	1.096.473.748	100 Persentase	938.359.997	100 Persentase	1.123.473.748	100 Persentase		27.000.000
2	1	0	2.0	001	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	N/A	N/A	1 Dokumen	55.108.300	1 Dokumen	820.000	1 Dokumen	55.108.300	1 Dokumen		0
2	1	0	2.0	001	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	N/A	N/A	1 Dokumen	25.441.600	1 Dokumen	13.432.350	1 Dokumen	25.441.600	1 Dokumen		0
2	1	0			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK</b>	<b>Persentase Sistem aplikasi strategis yang berfungsi dengan baik</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>55%</b>	<b>722.665.825</b>	<b>55%</b>	<b>202.630.000</b>	<b>55%</b>	<b>722.665.825</b>	<b>55%</b>		<b>0</b>

					<b>PENGAMANAN INFORMASI</b>												
2	1	0	2.0		<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan keamanan kominfo</b>	N/A	N/A	53 PD	722.665.825	53 PD	202.630.000	53 PD	722.665.825	53 PD	0	
2	1	0	2.0	000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	N/A	N/A	1 Dokumen	16.339.975	0 Dokumen	0	1 Dokumen	16.339.975	1 Dokumen	0	
2	1	0	2.0	000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	N/A	N/A	1 Laporan	84.896.150	0 Laporan	8.880.000	1 Laporan	84.896.150	1 Laporan	0	
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	N/A	N/A	53 Perangkat	621.429.700	53 Perangkat	193.750.000	53 Perangkat	621.429.700	53 Perangkat	0	
<b>TOTAL</b>										<b>20.966.314.681</b>		<b>4.809.345.327</b>		<b>24.340.787.745</b>			
2	1	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN</b>	<b>Persentase rata-rata capaian</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	

					<b>PEMERINTAHAN KABUPATEN /KOTA</b>	<b>kinerja aparatur</b>											
2	1	0	2.0		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2	1	0	2.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	1	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	1	0	2.0		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5 Laporan</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang/bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	1	0	2.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika n dan	Jumlah Dokumen Penatausaha n dan	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

					si Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
2	1	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	1	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	1	0	2.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	34 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	1	0	2.0		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa</b>	<b>6 Laporan</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2	1	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	
2	1	0	2.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

						Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan											
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

2	1	0	2.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	555 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki layanan informasi</b>	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0			<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase masyarakat dan PD yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik</b>	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	001	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	3 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	001	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

						komunikasi publik											
2	1	0	2.0	002	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	1	0	2.0	002	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	12 konten	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	1	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2	1	0	2.0		<b>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase nama domain dan sub domain pemerintah daerah sesuai standar penyelenggaraan domain dan sub domain</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2	1	0	2.0	000	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	1	0	2.0		<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

2	1	0	2.0	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	1 Aplikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	0024	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 aplikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	0032	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 aplikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	2.0	0033	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	53 Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

2	1	0	2.0	0034	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	53 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	1	0	2.0	0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	53 Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	2	0			<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>2.6</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2	2	0	2.0		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase data statistik Sektoral yang dipublikasikan</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2	2	0	2.0	0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	2	0	2.0	0019	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	2	0	2.0	0021	Pelaksanaan Proses Bisnis	Persentase kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

					Statistik Sektor Sesuai Standar	statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral										
2	200	2.0	002		Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	201	2.0			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Nilai Tata Kelola keamanan Indeks KAMI</b>	<b>690</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2	201	2.0			<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah penerapan kebijakan keamanan</b>	<b>1 kebijakan</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2	201	2.0	000		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	201	2.0	000		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan	1 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

					Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik											
2	2	0	2.0	000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	53 Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

### Rekapitulasi Hibah Tahun 2025

- Hibah Kepada Kejaksaan Negeri Jombang berupa Sarana Prasarana TIK dengan nilai usulan Rp. 531.253.330
  - Hibah Kepada Kodim 0814 Jombang berupa Permohonan dukungan Sarana dan Prasarana Kantor Kodim 0814/Jombang dengan nilai usulan Rp. 735.391.040
  - Hibah Kepada Satuan Radar Ploso TNI AU berupa PERMOHONAN DUKUNGAN PERALATAN ELEKTRONIKA dengan nilai usulan Rp. 50.000.000
- Total Hibah Tahun 2025 sebesar Rp. 1.316.644.370 (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah)**

### Rincian hibah pada Tahun 2025 sebagai berikut :

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA	PPN	JUMLAH
[ # ] Hibah Kepada KODIM JOMBANG							
[ - ] Genset 30 kva							
1	Genset	100 KVA	1 Unit x 0.271404	Unit	Rp 200,000,000.00	-	Rp 54,280,800.00
[ - ] Hibah Kodim							
1	Laptop 2 In 1	Surface Pro 8 Intel i5 gen 11th 8 GB 128 GB	1	Unit	Rp 14,864,865.00	-	Rp 14,864,865.00
2	PC Unit	Core i7-12700F, 8GB, 512GB SSD, RX 6400 4GB, Win 11, 21.5 Inch	2 Unit x 0.3922370525	Unit	Rp 21,517,600.00	-	Rp 16,880,000.00

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA	PPN	JUMLAH
3	Sound System Portable	Speaker Aktif, Subwoofer Aktif , Mixer Soundcraft, Stand Speaker Tripod, Kabel Audio + Jack Connecto, Kabel Speaker	1	Unit	Rp 70,850,000.00	11	Rp 78,643,500.00
4	ECOTANK L5290 WI-FI ALL-IN-ONE INK TANK PRINTER WITH ADF	EPSON ECOTANK L5290 WI-FI ALL-IN-ONE INK TANK PRINTER WITH ADF	1	Unit	Rp 5,919,000.00	-	Rp 5,919,000.00
[ - ] Perlengkapan Liputan							
1	Baterai Charger	BATERAI Eneloop Pro + Charger	1	Set	Rp 650,000.00	-	Rp 650,000.00
2	Camera	Camera Actio	1	Unit	Rp 9,675,000.00	-	Rp 9,675,000.00
3	Drone	DJI Mavic 3	1 Unit x 0.882448291299	Unit	Rp 36,410,700.00	-	Rp 32,130,560.00
4	DRY CABINET	Sumber Daya : 12W; Tegangan : 220V 50Hz; Volume : 90 Liter	1	Unit	Rp 3,290,000.00	11	Rp 3,651,900.00
5	Flash Camera	Flash Camera for Sony Digital Cameras	2 Buah x 0.868643678161	Pcs	Rp 3,480,000.00	-	Rp 6,045,760.00
6	Microphone Stand	Condenser Microphone Kit Poadcast Mic With Boom Arm Microphone Stand Microphone Stand	2	Set	Rp 759,000.00	-	Rp 1,518,000.00
7	Monopod	Height : 210cm, Alumunium	1	Unit	Rp 2,830,000.00	-	Rp 2,830,000.00
[ - ] Perlengkapan Podcast							
1	Camera	Mirrorless Digital Camera With 28-60mm Lens	1	Pcs	Rp 27,999,000.00	-	Rp 27,999,000.00

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA	PPN	JUMLAH
2	LED Light	Color LED Light	1 Buah x 0.944349557891	Pcs	Rp 4,320,000.00	11	Rp 4,528,345.00
3	LED Light	Light Dome Mini SE	1	Pcs	Rp 1,200,000.00	11	Rp 1,332,000.00
4	Lensa Camera	16mm f1.4 DC DN Contemporary Lens For Sony E	1	Pcs	Rp 8,420,000.00	-	Rp 8,420,000.00
5	Light Standt Tripod	Stand For Vidio Light	2	Pcs	Rp 399,000.00	-	Rp 798,000.00
6	Memory Card 128 GB	128 GB 1800x SDXC UHS-II Memory Card R: 280 MB/s	1	Pcs	Rp 963,000.00	11	Rp 1,068,930.00
7	Vidio Light	LED Vidio Light	2	Pcs	Rp 1,079,000.00	11	Rp 2,395,380.00
[ - ] Videotron Indoor							
1	Videotron Indoor	SMART-2.5 IN	8 Unit x 0.986666666667	Unit	Rp 58,500,000.00	-	Rp 461,760,000.00
[ # ] Hibah Kepada Satuan Radar 222 Ploso							
[ - ] Camera							
1	Camera	Mirrorless Digital Camera With 28- 60mm Lens	1	Pcs	Rp 27,999,000.00	11	Rp 31,078,890.00
[ - ] Laptop							
1	Laptop	Intel Core i7-12650H, 16 GB SO-DIMM DDR4, 512GB SSD	1 Unit x 0.863977625571	Unit	Rp 21,900,000.00	-	Rp 18,921,110.00
[ # ] Hibah Kepada Kejaksaan Negeri Jombang							
[ - ] Hibah Barang Kejaksaan Negeri Jombang							
1	DRY CABINET	Sumber Daya : 12W; Tegangan : 220V 50Hz; Volume : 90 Liter	1	Unit	Rp 3,290,000.00	-	Rp 3,290,000.00

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA	PPN	JUMLAH
2	ECOTANK L5290 WI-FI ALL-IN-ONE INK TANK PRINTER WITH ADF	EPSON ECOTANK L5290 WI-FI ALL-IN-ONE INK TANK PRINTER WITH ADF	8 Unit x 0.608210846427	Unit	Rp 5,919,000.00	-	Rp 28,800,000.00
3	Flash Camera	Flash Camera for Sony Digital Cameras	-	Pcs	Rp 3,480,000.00	11	Rp -
4	Kursi	CNHP202	20 Unit x 0.636942675159	Unit	Rp 1,884,000.00	-	Rp 24,000,000.00
5	Kursi Rapat A	KURSI VS 11 M	100 Buah x 0.41573901554931	Buah	Rp 1,475,950.00	-	Rp 61,361,000.00
6	Laptop	Intel Core i7-12650H, 16 GB SO-DIMM DDR4, 512GB SSD	8 Unit x 0.639269406393	Unit	Rp 21,900,000.00	-	Rp 112,000,000.00
7	Meja Rapat		20 Unit x 0.466490436946	Buah	Rp 2,572,400.00	-	Rp 24,000,000.00
8	PC Unit	Core i7-12700F, 8GB, 512GB SSD, RX 6400 4GB, Win 11, 21.5 Inch	12 Unit x 0.5576830129754	Unit	Rp 21,517,600.00	-	Rp 144,000,000.00
9	Scanner	Document A3	7 Unit x 0.448979591837	Unit	Rp 12,250,000.00	-	Rp 38,500,000.00
10	TV	50 inch	1	Unit	Rp 7,780,400.00	-	Rp 7,780,400.00

[ # ] Hibah Perangkat Elektronik Kepada Kejaksaan Negeri Jombang

[ - ] Hibah Barang Kejaksaan Negeri Jombang

1	Camera	Body Only, Camera DSLR, Body Only	1	Pcs	Rp 29,399,000.00	11	Rp 32,632,890.00
2	Camera	Flash Camera for Sony Digital Cameras	1	Pcs	Rp 3,480,000.00	11	Rp 3,862,800.00
3	LENSA	FE 70-200	1	Pcs	Rp 38,384,000.00	11	Rp 42,606,240.00

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	KOEFSIEN	SATUAN	HARGA	PPN	JUMLAH
4	Lensa Camera	16mm f1.4 DC DN Contemporary Lens For Sony E	1	Pcs	Rp 8,420,000.00	11	Rp 8,420,000.00

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **a. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang pada tahun 2025 dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mewujudkan *Good Governance*.

#### **b. Kaidah-kaidah pelaksanaan**

1. Dinas Kominfo Kabupaten Jombang menyusun Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi laporan realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025, meliputi realisasi pencapaian target kinerja sub kegiatan, penyerapan dan/anggaran, dan kendala/permasalahan yang dihadapi, sehingga menunjukkan perlu dilakukannya perubahan;
2. Dinas Kominfo Kabupaten Jombang menyusun Rancangan Perubahan Renja PD yang memuat seluruh sub kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran, baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan.
3. Perubahan Renja PD Dinas Kominfo Kabupaten Jombang dengan mendasar pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebagai berikut :
  - 1) Mengakomodir kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan diformulasikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025,
  - 2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2025;
4. Perubahan kegiatan-kegiatan dilakukan dalam rangka:
  - a. Mengakomodir visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Jombang.

- b. Penanganan Isu Strategis Nasional dan Daerah yang harus segera di tindaklanjuti dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan yaitu:
- Penguatan Sumber Daya Manusia, pendidikan, dan kesehatan;
  - Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
  - Pencegahan stunting dan kemiskinan;
  - Pengendalian Inflasi;
  - Peningkatan pertumbuhan ekonomi;
  - Dukungan swasembada pangan;
  - Koperasi Merah Putih;
  - Sekolah Rakyat.
- c. Pencapaian target Sustainable Development Goals (SDG's) sebagaimana diamanatkan ketentuan perundang-undangan;
- d. Akselerasi dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Kementerian;
- e. Menindaklanjuti kebijakan Nasional dan Provinsi yang harus dialokasikan di daerah.
5. Renja Dinas Kominfo Kabupaten Jombang melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan APBD Tahun 2025 diselesaikan pada tahun berkenaan;
6. Usulan penambahan anggaran kegiatan untuk mendukung pencapaian target kinerja tahun 2025;

### c. Rencana Tindak Lanjut

#### Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

#### VISI : MEWUJUDKAN JOMBANG MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA

**MISI : 5. Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif (open & collaborative governance), melayani, akuntabel, bersih dan bebas korupsi.**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Tindak Lanjut
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berbasis Digital serta pelayanan publik merata.	Terwujudnya transformasi birokrasi berbasis digital.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (digitalisasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun	Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) secara optimal sebagai upaya menciptakan budaya kerja dan kualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan koneksi internet dan intranet pada 61 OPD (120 titik koneksi)</li> <li>• Menyediakan koneksi free wifi pada 306 desa/kelurahan</li> </ul>
P-RENJA TAHUN 2025   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB.				82

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Tindak Lanjut
		<p>pelayanan publik (optimalisasi) penciptaan sistem pemerintahan berbasis elektronik) di seluruh Perangkat Daerah.</p>	<p>kerja yang lebih efektivitas dan efisien.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan pusat data (ruang server) untuk memfasilitasi penempatan aplikasi layanan pemerintahan dan layanan public</li> <li>• Mengembangkan aplikasi dan basis data layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi;</li> <li>• Memfasilitasi IP Publik, penyelenggaraan subdomain OPD, email OPD, dan subdomain desa</li> <li>• Memfasilitasi koordinasi SPBE;</li> <li>• Memfasilitasi penyelenggaraan layanan panggilan darurat 112;</li> <li>• Memfasilitasi pemberian rekomendasi perizinan Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif (PBIP)</li> <li>• Penyusunan Masterplan Statistik dan Integrasi Data sektoral</li>   <li>• Implementasi penguatan data sektoral berbasis</li> </ul>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Tindak Lanjut
				digital; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas dan frekuensi data statistik;</li> <li>• Penerapan dashboard untuk analisis kebijakan;</li> <li>• Pengembangan; sistem statistik berbasis blockchain</li> <li>• Pemetaan risiko dan audit keamanan sandi;</li> <li>• Penguatan CSIRT Jombangkab</li> <li>• Pengembangan SDM sandi bersertifikasi</li> <li>• Penilaian maturitas keamanan informasi (Indeks KAMI);</li> <li>• Penerapan teknologi keamanan berbasis blockchain;</li> <li>• Partisipasi Publik dan Literasi Komunikasi</li> <li>• Evaluasi dan Rebranding Komunikasi Pemerintah</li> </ul>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Tindak Lanjut
	Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan dengan ASN yang profesional	Meningkatkan kualitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik, baik pada kualitas sumber daya manusia, kebijakan tata kelola, sarana-prasarana pelayanan, dan sumberdaya pendukung yang relevan lainnya.	Transformasi tata kelola pemerintahan yang lincah (agile) dan pelayanan publik menuju daya saing daerah yang kompetitif.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pegawai Pemerintah

Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran Dinas Kominfo Kabupaten Jombang untuk melakukan pengelolaan dan penataan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Jombang, maka secara terus menerus perlu dilakukankajian dan penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan ini untuk mengakomodasi berbagai perubahan/dinamika yang terjadi. Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Kominfo ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik.

Jombang, 30 Juni 2025  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN JOMBANG**



**ENDRO WAHYUDI, S.STP**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 198005281999121001